

## BAB V

### SIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan teori dan konsep terkait, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

##### **1. Identifikasi Data Kejadian Kebocoran Data Pribadi di Polres Cilacap Periode Tahun 2021 s.d. 2022**

Data kejadian fenomena Kebocoran Data Pribadi di Polres Cilacap Periode Tahun 2021 s.d. 2022 berdasarkan studi kasus peneliti telah terjadi kasus pelanggaran data pribadi pada tanggal 25 Juli 2022 yaitu oknum pedagang *celuller* 'YD' menjual kartu perdana yang sudah ter-registrasi atas nama NIK dan KK orang lain demi keuntungan pribadi. Data pribadi tersebut didapat dari oknum *sales provider* 'DNS' dan 'GNW'. Fenomena tersebut merupakan kebocoran data secara disengaja. Kebocoran data pribadi secara tidak sengaja dapat terjadi karena masyarakat Cilacap memiliki daya literasi yang rendah.

Latar belakang terjadi kebocoran data pribadi di Cilacap dikarenakan *human error* masyarakat Cilacap yang sangat bergantung pada kemampuan literasi media yang masih rendah, *software* bajakan, kesalahan alur bisnis, *outsourcing* pihak ketiga. Tingkat literasi rendah berkaitan dengan tingkat Pendidikan yang hanya sedikit sudah sarjana serta mata pencaharian masyarakat yang umumnya seorang petani.

## **2. Identifikasi Permasalahan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Guna Mencegah Kebocoran Data Pribadi di Polres Cilacap**

Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan SDM guna mencegah kebocoran data pribadi dianalisis berdasarkan Teori Kompetensi masih terdapat beberapa kekurangan. Dari sisi pengetahuan (*knowledge*) dikaitkan dengan *behavior competency* dan *organizational knowledge*, yaitu tingkat Pendidikan Bhabinkamtibmas yang hanya 36 personel yang sudah menempuh pendidikan tinggi hal ini berkaitan dengan faktor usia dan tingkat motivasi Bhabinkamtibmas. Dari sisi keterampilan (*skill*) dikaitkan dengan dimensi *technical competency*, yaitu kemampuan Bhabinkamtibmas dalam memberikan penyuluhan, sambang, deteksi dini dan membantu olah TKP hal ini berkaitan dengan keterbatasan kuota Dikbangspes untuk Bhabinkamtibmas, pelaksanaan pelatihan/forum komunikasi Bhabinkamtibmas hanya dilakukan setahun sekali, dan materi yang disampaikan pelatihan/forum komunikasi Bhabinkamtibmas terkesan formalitas. Dari sisi sikap (*attitude*) dikaitkan dengan *job exposure*, walaupun dari segi *knowledge* dan *skill* masih terdapat beberapa kekurangan, namun Bhabinkamtibmas mengutamakan dari segi *attitude*. Segi *knowledge* dan *skill* menjadi permasalahan utama Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan sumber daya manusia guna mencegah kebocoran data pribadi di Polres Cilacap.

## **3. Strategi Mitigasi Bhabinkamtibmas dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Guna Mencegah Kebocoran Data Pribadi di Polres Cilacap**

Strategi mitigasi Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan sumber daya manusia guna mencegah kebocoran data pribadi dianalisis menurut Teori Manajemen George R. Terry yaitu berdasarkan beberapan tahapan (*Planning*,

*Organizing, Actuating, Controlling*) selanjutnya dijabarkan poin-poin dengan pasal 8, 9 dan 11 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Binluh Kamtibmas, masih ditemukan beberapa kekurangan, yaitu pada tahap *Planning* kurangnya daya kreatifitas, kurang aktif berkoodirnasi dengan pejabat sekitar, kurang pengetahuan terkait kebocoran Data Pribadi. Pada tahap *Organizing* yaitu pemetaan tugas Bhabinkamtibmas belum merata dikarenakan kekurangan personel, Bhabinkamtibmas masih merangkap desa binaan, merangkap pekerjaan di satuan fungsi lain. Pada tahap *Actuating*, yaitu tidak dibekali ilmu yang cukup terkait data pribadi, belum optimal dalam menguasai *audience*. Pada tahap *Controlling* sudah berjalan sesuai harapan. Beberapa kendala yang terjadi dalam strategi mitigasi Bhabinkamtibmas mengakibatkan masyarakat kurang mampu untuk menganalisa fenomena kebocoran data pribadi.

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Guna Mencegah Kebocoran Data Pribadi di Polres Cilacap**

Faktor-faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan sumber daya manusia guna mencegah kebocoran data pribadi dianalisis berdasarkan unsur manajemen 4M (*Man, Money, Material, Method*) kemudian dijabarkan berdasarkan Diagram Tulang Ikan. Dari unsur *Man* yaitu masih terkendala jumlah riil Bhabinkamtibmas, merangkap tugas/desa binaan, pemahaman terkait data pribadi, kemampuan multimedia, kurang inovatif. Dari unsur *Money* sebenarnya anggaran sudah cukup namun dikarenakan ada beberapa Bhabinkamtibmas yang merangkap pekerjaan sehingga menjadi kurang namun tidak melunturkan semangat kerja Bhabinkamtibmas. Dari unsur *Material* merujuk

pasal 16 ayat (3) Perkap Nomor 7 Tahun 2021 masih ada beberapa perlengkapan Bhabinkamtibmas yang belum terpenuhi akan tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala untuk Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan Kamtibmas. Dari unsur *Method* dilakukan secara tatap muka tingkat mobilitas yang tinggi dari masyarakat, kurang keterarikan masyarakat dengan materi, namun sudah dibentuk Pokdar Kamtibmas kemudian secara tidak tatap muka dapat dilakukan melalui *Whatsapp* grup.

## **5.2 Implikasi**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Peran Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan sumber daya manusia guna mencegah kebocoran data pribadi masih tidak terlaksana secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menyampaikan beberapa implikasi, sebagai berikut:

### **Implikasi Manajerial :**

1. Bhabinkamtibmas sebaiknya meningkatkan koordinasi dengan *virtual police* pada Satuan Reskrim Polres Cilacap. Apabila terjadi indikasi kebocoran data pribadi di wilayah Cilacap, Bhabinkamtibmas dapat segera melakukan sambang dan melakukan penyuluhan untuk disampaikan terkait pelanggaran hukum fenomena kebocoran data pribadi.
2. Bhabinkamtibmas harus memfokuskan penyuluhannya kepada warga yang termasuk lapisan bawah dimana tingkat pendidikannya yang masih kurang, karena dirasa masyarakat lapisan bawah lebih rawan terkena dampak dari fenomena kebocoran data pribadi.

3. Terkait kurangnya koordinasi dengan pejabat dan instansi terkait, Bhabinkamtibmas seharusnya membentuk grup *whatsapp* yang didalamnya terdapat Bhabinkamtibmas, seluruh pejabat dari semua instansi yang ada di wilayahnya, sehingga akan mudah untuk menyebarkan pesan-pesan Kamtibmas terkait kebocoran data pribadi.
4. Berkaitan dengan penguasaan *audience*, Polres Cilacap seharusnya memberikan Bhabinkamtibmas pelatihan rutin terkait *public speaking* dan mengadakan lomba *public speaking* untuk para Bhabinkamtibmas agar termotivasi untuk meningkatkan kemampuan *public speaking* nya.
5. Terait permasalahan umur anggota Bhabinkamtibmas sehingga kurangnya motivasi untuk meningkatkan tingkat Pendidikan tingginya, Polres Cilacap perlu mengadakan peremajaan Bhabinkamtibmas guna menjadikan anggota Bhabinkamtibmas yang berjiwa muda dan masih semangat untuk meningkatkan taraf pendidikannya.
6. Berkaitan dengan kemudahan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, seharusnya Bhabinkamtibmas mensosialisasikan dan mendorong agar seluruh masyarakat desa agar membentuk grup WA yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat, kemudian para tokoh masyarakat tersebut tergabung dengan grup WA yang berisikan Bhabinkamtibmas dan seluruh tokoh masyarakat tersebut sehingga penyampaian pesan Kamtibmas khususnya terkait kebocoran data pribadi dapat diterima sampai masyarakat lapisan terbawah.
7. Berkaitan dengan aksi respon cepat kepada masyarakat, seharusnya Bhabinkamtibmas menyebarkan nomor HP nya kepada masyarakat desa

binaannya, sehingga Ketika ada permasalahan terjadi khususnya terkait fenomena kebocoran data pribadi, Bhabinkamtibmas dapat dengan cepat untuk merepon dan memberikan solusi permasalahan tersebut.

8. Berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas khususnya dalam cara berkomunikasi yang lebih efektif dan komunikasi dalam hal keagamaan. Seharusnya Sat Binmas Polres Cilacap mengadakan lomba Da'i Kamtibmas bagi seluruh Bhabinkamtibmas dan dinilai langsung oleh tokoh agama sekitar.

#### **Implikasi Teoritis :**

1. Berkaitan dengan studi kasus peneliti terkait fenomena kebocoran data pribadi di Cilacap yang dilakukan oleh oknum penjual kartu perdana dan *sales provider*, Bhabinkamtibmas sebaiknya lebih fokus menggandeng masyarakat komunitas penjual *counter HP* di wilayah Cilacap untuk mensosialisasikan terkait hukum penyalahgunaan data pribadi.
2. Terkait pengetahuan Bhabinkamtibmas yang masih minim terkait fenomena kebocoran data pribadi, seharusnya Polres Cilacap mengadakan kegiatan rutin seperti kuliah umum, FGD, diskusi panel dengan para pakar (dosen, ilmuwan, ahli hukum) terkait materi kebocoran data pribadi yang dihadiri oleh seluruh Bhabinkamtibmas di Polres Cilacap.
3. Berkaitan dengan kurangnya daya kreatifitas Bhabinkamtibmas dalam memproduksi pesan Kamtibmas seperti gambar atau video. Sat Binmas Polres Cilacap seharusnya mewajibkan para Bhabinkamtibmas membuat media sosial

agar bisa mengambil gambar atau video hasil karya seksi Humas Polres Cilacap untuk dijadikan bahan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih menarik.

4. Berkaitan dengan masih belum terpenuhinya jumlah personel Bhabinkmatibmas, sebaiknya Bhabinkamtibmas menunjuk seorang warga untuk dijadikan 'wakil' Bhabinkamtibmas sebagai kepanjangan tangan Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas di masing-masing desanya. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengantisipasi waktu dan jarak yang menjadi kendala bagi para Bhabinkamtibmas yang memiliki lebih dari satu desa binaan.
5. Peningkatan kegiatan inovatif dan kreatif yang wajib dilakukan oleh Bhabinkamtibmas selain shubuh keliling dan jumat keliling, semisal perbaikan jalan dan fasilitas umum dengan dana patungan dari warga desa sekitar. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan solidaritas antara Bhabinkamtibmas dan warga sehingga warga akan mendukung segala kegiatan Bhabinkamtibmas.
6. Berkaitan dengan permasalahan Bhabinkamtibmas yang belum mengikuti Pendidikan pengembangan spesialis Bhabinkamtibmas/Binmas, Polres Cilacap perlu pelatihan terkait kemampuan dasar Bhabinkamtibmas secara rutin.
7. Berkaitan dengan peningkatan motivasi Bhabinkamtibmas, Sat Binmas Polres Cilacap perlu memberikan *reward* dan *punishment* yang jelas terhadap kinerja Bhabinkamtibmas dan dilaksanakan secara rutin. Jika perlu disematkan *reward* tersebut pada saat apel bersama setiap hari senin untuk meningkatkan daya motivasi dan kepercayaan diri Bhabinkamtibmas.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya peneliti merasakan masih banyak keterbatasan, sehingga penelitian yang dilakukan masih belum mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu saran peneliti terkait keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian dilaksanakan dengan Teknik pengumpulan data *Focus Group Discussion* (FGD) dan pelaksanaannya hanya meliputi anggota Bhabinkamtibmas dan masyarakat Cilacap. FGD memiliki tujuan agar mendapatkan data secara akurat dan saling melengkapi dari suatu topik yang didiskusikan. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah dan lingkup partisipan penelitian FGD tidak hanya dari sisi masyarakat dan Polri melainkan juga dari instansi terkait seperti TNI, pegawai negeri lainnya.
2. Berkaitan dengan lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni wilayah Polres Cilacap yang warganya masih terbelah memiliki tingkat Pendidikan yang cukup rendah. Hal ini berdampak pada tingkat literasi masyarakat yang cukup rendah. Sehingga ke depannya perlu dilaksanakan penelitian lanjutan di wilayah yang memiliki masyarakat dengan tingkat Pendidikan lebih tinggi.
3. Berkaitan dengan studi kasus terkait fenomena kebocoran data pribadi yang masih sangat minim di wilayah hukum Polres Cilacap. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap wilayah yang memiliki fenomena kebocoran data pribadi yang tinggi dan rawan, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi akan lebih kompleks.

4. Berkaitan dengan partisipan wawancara yang masih sebatas anggota Polri, tokoh masyarakat, dan pelajar dan dirasa masih belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah partisipan penelitian meliputi *stakeholder* terkait yaitu TNI, pegawai negeri lainnya, dan pakar hukum.